

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KOMITMEN
ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS
AKRUAL**

**(Studi Empiris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah)**



**Disusun sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

ANDIKA YULIANTO

B 200 140 074

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
KOMITMEN ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
(Studi Empiris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

ANDIKA YULIANTO

B 200 140 074

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Erma Setiawati, M.M., CA

NIDN. 0610106401

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
KOMITMEN ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL**

**(Studi Empiris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah)**

Oleh :

ANDIKA YULIANTO

B 200 140 074

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta, 25 Oktober 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dr. Erma Setiawati, M.M., CA
(Ketua Dewan Penguji)

(*Erma Setiawati*)

2. Drs. Suyatmin Waskito Adi, S.E., M.Si
(Anggota 1 Dewan Penguji)

(*Suyatmin Waskito Adi*)

3. Drs. M. Abdul Aris, M.Si
(Anggota 2 Dewan Penguji)

(*M. Abdul Aris*)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, M.M
NIDN.017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Oktober 2018

Penulis



ANDIKA YULIANTO

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KOMITMEN ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

(Studi Empiris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah sampel yang diambil 60 pegawai. Penelitian ini menggunakan convenience sampling. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Abstract

This study aims to determine the Influence of Human Resource Competencies, Organizational Commitment, Information Technology Utilization, and Implementation of Internal Control Systems on the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards. The approach used in this study is a quantitative approach. This research was conducted at the Central Java Province Financial and Asset Management Agency. The number of samples taken by 60 employees. This study uses convenience sampling. Data was collected by questionnaire method. The data analysis technique used is Multiple Linear Regression. The results of this study indicate that the application of internal control systems has a significant effect on the implementation of accrual-based government accounting standards, while human resource competencies, organizational commitment and information technology utilization do not affect the quality of local government financial reports.

Keywords: Human Resource Competence, Organizational Commitment, Information Technology Utilization, Implementation of Internal Control Systems, Implementation of Accrual Based Government Accounting Standards.

1. PENDAHULUAN

Setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan Good Governance. Pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan peraturan yang menuntut pemerintah pusat juga pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. (Rihardjo dan Jaladri, 2016)

Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah selesai disusun Komite Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan tersebut mensyaratkan penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun akhir 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah sudah harus menerapkan SAP berbasis akrual. Teknik akuntansi berbasis akrual dinilai dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu keefektifan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sangat diperlukan pemerintah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik sehingga menghasilkan laporan keuangan jelas dan dapat dipertanggungjawaban serta lengkap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. (Rihardjo dan Jaladri, 2016)

Penerapan basis akuntansi akrual dipandang sebagai bagian reformasi manajemen keuangan dan birokrasi, reformasi seperti itu telah digalakkan oleh aparat pemerintah, khususnya Departemen Keuangan yang menjadi barisan paling depan dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kementerian-kementerian lain dalam birokrasi penulis yakin akan segera mengikutinya, sepanjang perubahan tersebut akan menyebabkan ke arah budaya organisasi yang lebih akuntabel. Hal ini dapat terlihat dari minat mereka pada saat

ikut serta dalam program pendidikan dan pelatihan di bidang akuntansi pemerintah pada saat Departemen Keuangan melaksanakan program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah yang dimulai sejak tahun 2007 untuk satuan kerja di Kementerian Keuangan dan mulai tahun 2008 untuk satuan kerja di kementerian lain diluar Depertemen Keuangan. (Iznillah, 2015)

Perubahan standar akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan prokontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul.

Melihat hal tersebut, Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang menduduki peran sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP (Indriani, 2013). Simanjuntak (2010) mengungkapkan “akuntansi berbasis akrual mempunyai berbagai kendala, antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Kendala lain dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas dari sistem pencatatan sehingga sangat diperlukan ketersediaan SDM yang kompeten.” Pemerintah daerah wajib memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang keuangan daerah dan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Ardiansyah (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang ada di sebuah SKPD maka semakin siap pula sumber daya manusia tersebut untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Maka dari itu harus dipastikan pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual juga diperlukan komitmen pemerintah daerah agar peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan berjalan dengan efektif. Putra dan Ariyanto (2015) menyatakan secara empiris bahwa komitmen organisasi sangat berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual karena semakin tinggi komitmen organisasi dalam penerapan peraturan pemerintahan, maka semakin

tinggi pula tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dengan pemerintah daerah yang memiliki komitmen organisasi tinggi, maka pemerintah akan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat laporan keuangan pemerintah lebih transparan dan memiliki akuntabilitas.

Dalam menunjang keefektifan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No.11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah. Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan SKPD dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Faktor selanjutnya adalah penerapan sistem pengendalian intern. Meskipun pemerintahan memiliki seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan yang memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh Widyaningrum dan Rahamawati (2010) bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah dinyatakan dengan

ketepatan waktu dan keterandalan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sangat diperlukan karena dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KOMPETENSI ORGANISASI, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL"

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar atau data yang berupa keterangan-keterangan dan tidak berbentuk angka-angka (Sugiyono, 2013:14). Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai pengelola keuangan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan pendekatan convenience sampling. Convenience sampling merupakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya (Sekaran, 2006). Responden dalam penelitian ini adalah pegawai berstatus pegawai negeri sipil yang bekerja di bagian akuntansi akuntansi/anggaran/perbendaharaan/aset pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden yang bekerja pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Penyebaran kuesioner, di sebarakan keseluruh pegawai yang bekerja di bagian akuntansi akuntansi/anggaran/perbendaharaan/aset pada BPKAD Provinsi

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama mendapatkan hasil bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,097 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,6828 atau dapat dilihat dari signifikansi $0,280 > \alpha = 0,05$ maka H_1 ditolak, yang berarti Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Hal ini menunjukkan bahwa terbatasnya kemampuan pegawai yang bekerja dibidang keuangan/akuntansi, tidak semua yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi memahami standar akuntansi pemerintah berbasis akrua sehingga pelatihan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua masih diperlukan untuk mendukung implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrua dapat berjalan dengan baik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwaningrum (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, I Wayan Gede dan Dodik Ariyanto (2015) yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua mendapatkan hasil bahwa variabel Komitmen Organisasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,327 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,6828 atau dapat dilihat dari signifikansi $0,193 > \alpha = 0,05$ maka H_2 ditolak, yang berarti Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Hal ini menunjukkan penerapan SAP yang dilakukan sudah menjadi suatu peraturan atau prosedur yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan sehingga pegawai tinggal melaksanakannya dengan rutinitasnya, serta dikarenakan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah belum memiliki komitmen organisasi yang kuat untuk membantu organisasi dalam menjalani perubahan. Hal ini menandakan belum terdapat komitmen organisasi yang tinggi untuk menyukseskan penerapan SAP berbasis akrua.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwaningrum (2017) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi, Luh desy et,al (2017) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga mendapatkan hasil bahwa Variabel Penerapan Teknologi Informasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,222 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,6828 atau dapat dilihat dari signifikansi $0,825 > \alpha = 0,05$ maka H_3 ditolak, yang berarti Penerapan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan sistem informasi tidak akan mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrua. Tidak berpengaruhnya variabel sistem informasi pada penelitian ini disebabkan oleh belum adanya ketersediaan sarana teknologi informasi yang memadai yang dapat menunjang standar akuntansi pemerintah berbasis akrua serta, tidak banyaknya pegawai yang bisa beradaptasi dengan penggunaan sistem informasi dikarenakan kurangnya pelatihan untuk peningkatan kualitas pengguna sistem informasi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitrizal (2017), yang menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pratiwi, Annisa et.al (2017), yang menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan pengujian hipotesis keempat mendapatkan hasil bahwa Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,929 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,6828 atau dapat dilihat dari signifikansi $0,006 < \alpha = 0,05$ maka H_4 diterima, yang berarti Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lestari, 2015). Sehingga tinggi rendahnya sistem pengendalian intern akan mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah.

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Penerapan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa

Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga penulis tidak dapat mengawasi secara langsung atas pengisian jawaban tersebut, dikarenakan hampir semua kuesioner tersebut pada saat pengisian tidak dapat di tunggu secara langsung, sehingga jawaban dari responden mungkin tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dikarenakan kondisi-kondisi tertentu masing-masing responden

Obyek penelitian hanya terbatas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan keterbatasan yang lebih dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh dari variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas subjek penelitian, tidak terfokus pada satu dinas seperti pada penelitian ini yang hanya terfokus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Mohammad, Evan Sembada Sugiarto. 2014. *"Faktor-Faktor Pendukung Atas Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Di Kota Solo"*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Universitas Satya Wacana. 2014.

Apriliani, Dina. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Jepara*. Skripsi. Universitas Muria Kudus

Arih, Tyas. N. 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Bandung*. Jurnal Universitas Telkom

- Farida, et al. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Investasi Volume 15 Nomor 2.
- Fitrizal. 2017. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pesisir Selatan)*. Artikel. Padang. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Cetakan IV. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 5. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawati N. T, Dewi L.D.S, Purnamawati, I.G.A. 2017. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keberhasilan Penerapan Sap Berbasis Akrual*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 Nomor 1).
- Handayani, et al. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pengelolaan Barang Milik Negara*. Universitas Widyatama. ISSN: 2252-3936.
- Iznillah M.Lutfi. 2015. *Pengaruh Kualitas SumberDaya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. JOM FEKON Universitas Riau, Fakultas Ekonomi (Volume 2 Nomor 2).
- Jaladri, E.Q, Riharjo, I.B. 2016. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 5, Nomor 11, ISSN: 2460-0585.
- Kamemy, Laraswisesa. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah Provinsi Riau*. JOM FEKON Volume 4 Nomor 1.
- Kristiawati, Endang.2015.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat*.Skripsi.Universitas Panca Bhakti Pontianak.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta

- Marsdenia dan Arthaingan, M.H. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Jurnal Vokasi Indonesia Universitas Indonesia (Volume 4 Nomor 2).
- Norfaliza.2015.*Analisis Faktor Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir)*.Skripsi.Pekanbaru.Universitas Riau.
- Peraturan Pemerintah Tahun 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pratiwi, Annisa, et al. 2017. *Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Koitmen dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintahan Kota Bandung*. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) Volume 9, Nomor 1, ISSN 2088-5091.
- Purwaningrum. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, I Wayan Gede dan Dodik Ariyanto. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya. ISSN: 2302-8556
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Zutilisna, et al. 2017. *Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen, dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. e-Proceeding of Management: Volume 4, Nomor 2, ISSN: 2355-9357.